



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD FAUZI MAKKI**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR III**
3. NHK : **622666**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.480.000.000

1. Tanah Seluas 5176 m2 di KAB / KOTA BATOLA, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000
2. Tanah Seluas 5716 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL
SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 591 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 387 m2/150 m2 di KAB / KOTA HULU
SUNGAI SELATAN, WARISAN Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,
HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
8. Tanah Seluas 83 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL
SENDIRI Rp. 80.000.000
9. Tanah Seluas 1144 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
10. Tanah Seluas 552 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,
HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
11. Tanah Seluas 2400 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	303.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOOTER / SPD MTR RD 2 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
2. MOBIL, HONDA JAZZ / MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	200.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	356.846.511
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.339.846.511
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.339.846.511

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.